

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Pengembangan Pariwisata Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang

Dari hasil temuan dilapangan dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata di Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang apabila ditinjau dari dari komponen pengembangan pariwisata 4A yaitu :

1. Atraksi di Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang berupa wisata alam yakni Bukit Berkontur yang hijau, pemandangan lampu kota atau citylights, dan hewan ternak yang dilepas bebas yang memberikan suasana seperti di pedesaan meskipun letak di perkotaan. Sedangkan Atraksi di Bukit Senja yang berupa wisata buatan adalah adalah Area panahan, *Cafe* Kalibrasi, dan Gazebo yang dibangun secara semi permanen dengan konsep natural dan semi permanen
2. Aktivitas yang terdapat di Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang yakni wisata kuliner berupa foodcourt maupun UMKM kuliner milik masyarakat RW 8 Kelurahan Tembalang, dan *Cafe* Kalibrasi. Wisata edukasi bersifat beragam karena didukung oleh karakteristik kawasan yang terbuka dan dilakukan oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar tingkat dasar hingga mahasiswa dan komunitas. Sedangkan aktivitas wisata dengan minat khusus komunitas panahan, fotografi, burung macaw dan musik.

3. Aksesibilitas yang terdapat di Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang berupa Akses jalan menuju Bukit Senja Diponegoro cukup baik dengan jalur utama melalui perumahan warga, meski jalan dari gerbang ke parkir masih berbatu dan minim penerangan. Transportasi dapat ditempuh melalui kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, dan kendaraan umum yakni BRT dan berjalan kaki 1,5 km dari lokasi. untuk papan petunjuk arah dinilai kurang representatif dari segi bentuk maupun penempatan lokasi, tidak terdapat peta lokasi wisata dan terdapat *travel route* yang dapat diakses melalui *Google Maps*.
4. Amenitas di Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang berupa akomodasi, tempat makan dan minum, serta fasilitas umum telah tersedia cukup memadai. Akomodasi di sekitar lokasi bervariasi dan memenuhi preferensi wisatawan, Tempat makan dan minum masih terkendala pencahayaan saat malam hari. Fasilitas umum seperti area parkir, toilet, mushola namun kondisi *foodcourt* kurang terawat.

4.1.2 Faktor pendukung dan Faktor Penghambat Pengembangan Pariwisata Bukit Senja Diponegoro

1. Faktor Pendukung

- i. Nilai yang dibawa oleh masing masing aktor :
 - a. Nilai organisasi : Pokdarwis menanamkan nilai organisasi yang kuat berbasis pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, keamanan kawasan, dan pembangunan sosial pokdarwis menekankan kepada pemberdayaan ekonomi lokal dan selaras dengan nilai yang dianut oleh Karang Taruna.

Karang Taruna RW 8 pun memperkuat nilai solidaritas, gotong royong, dan kekeluargaan dalam mendukung operasional kawasan secara partisipatif, Tujuan organisasi yakni memberdayakan generasi muda sebagai pelaku wisata juga berhasil diimplementasikan oleh Karang Taruna. Dimana nilai yang bersinergi antara pokdarwis dan Karang Taruna berpengaruh terhadap kinerja dan pengembangan Bukit Senja Diponegoro. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah menunjukkan keselarasan dengan arah kebijakan kota, khususnya dalam aspek peningkatan kualitas SDM, pengembangan ekonomi kreatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata yakni dengan adanya penyediaan fasilitas dalam penguatan kapasitas SDM. Sementara itu, aktor yang bersifat eksternal yakni *content creator* lokal berkontribusi lewat nilai kreativitas yang mendorong promosi destinasi secara inovatif dan berbasis identitas lokal untuk kepentingan konten *content creator* namun memiliki dampak positif berupa penambahan pengunjung secara tidak langsung.

- b. Nilai legal yang mendukung yakni Surat Keputusan (SK). Pokdarwis Bukit Senja Diponegoro telah ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Nomor 13/411/536/II/2023. SK ini memberikan

legitimasi resmi atas pembentukan dan operasional Pokdarwis sebagai entitas yang mengelola destinasi wisata.

- c. Nilai Kepentingan Kolektif : Nilai kepentingan kolektif dalam pengembangan pariwisata Bukit Senja Diponegoro yakni kesejahteraan ekonomi masyarakat, pelestarian dan perawatan lingkungan, keamanan dan kenyamanan publik, serta solidaritas dan gotong royong yang dianut oleh Pokdarwis, Bukit Senja, dan masyarakat yang menjadi dasar dalam kesetaraan manfaat, solidaritas masyarakat, serta implementasi wisata berbasis komunitas

ii. Komunikasi

Komunikasi internal yang kuat dan hubungan personal yang erat antar aktor kunci mendukung pengembangan pariwisata Bukit Senja Diponegoro. Pokdarwis dan Karang Taruna menjalin komunikasi rutin dan intens, baik secara formal maupun informal, karena kedekatan sosial dan kesamaan tujuan. Relasi personal Ketua Pokdarwis dengan Kepala Bidang Kelembagaan Kepariwisata Dinas Pariwisata juga memfasilitasi komunikasi berkala dan dukungan. Selain itu, Terdapat jaringan yang bersifat semi-formal antara Pokdarwis dengan akademisi (dosen), terutama karena dosen terkait merupakan warga RW 8 Kelurahan Tembalang sehingga menghasilkan komunikasi yang fleksibel yang menciptakan

peran ganda yakni sebagai akademisi sekaligus masyarakat lokal. Selain itu adanya inisiatif dari pihak eksternal seperti akademisi dan content creator secara spontan turut mendukung promosi dan daya tarik Bukit Senja, meskipun belum terjalin kerja sama formal. Saling ketergantungan antar aktor menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi

iii. Kepercayaan

Kepercayaan tercermin dari kepercayaan Pokdarwis terhadap masyarakat dalam kegiatan operasional, kepercayaan Dinas Pariwisata kepada Pokdarwis melalui penerbitan SK, serta kepercayaan masyarakat dan Karang Taruna terhadap kapasitas pemuda dalam mengelola unit usaha yang mempengaruhi pembagian peran, pelimpahan wewenang, serta partisipasi aktif masing masing aktor.

iv. Sumber Kebijakan

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota (RIPPARKOT) Semarang, RPJMD Kota Semarang 2021-2026, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, RPJMN 2020-2024, dan Peraturan Walikota Semarang No. 39 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berkualitas memberikan arahan yang menegaskan legalitas Pokdarwis, mengatur alur peran dan fungsi pemerintah

sebagai sumber kebijakan, serta mendukung pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, yang semuanya relevan dengan aktivitas di Bukit Senja.

2. Faktor Penghambat

- i. Nilai yang dibawa masing masing aktor
 - a. Nilai legal : keterbatasan legalitas muncul karena status kepemilikan lahan tempat wisata Bukit Senja yang masih menjadi milik PT Karya Usaha Baru (KUB), tanpa adanya perjanjian pemanfaatan secara tertulis. Hal ini menyebabkan Pokdarwis tidak dapat mengakses bantuan dari pemerintah daerah. Keterbatasan berupa nilai legal ini mempengaruhi sikap kelurahan yang berpegang teguh kepada keterbatasan wewenangnya disebabkan oleh kepemilikan tanah Bukit Senja sehingga tidak menjadikan bukit senja sebagai prioritas bahkan tidak ada peran sebagai penasihat.

Status Kepemilikan lahan ini juga berpengaruh dengan nilai kurang optimis yang dimiliki oleh Pokdarwis dan Karang Taruna yang berdampak pada pengembangan Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang.
- ii. Kepercayaan

Kepercayaan belum merata dimiliki oleh seluruh aktor, yang terlihat dari sikap kehati-hatian pihak Kelurahan yang terbatas akibat status lahan yang belum dimiliki pemerintah.

iii. Komunikasi

Hambatan dari Komunikasi terlihat dari frekuensi komunikasi yang terjadi dengan dinas pariwisata yang tidak diperbarui secara berkala dan tidak adanya komunikasi terkait pengembangan pariwisata Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang kepada kelurahan, selain itu masih terdapat ketidakpastian dari pihak PT KUB sebagai pemilik lahan kepada Pokdarwis Bukit Senja. Selain itu, dari sisi perbedaan pesan yang ditangkap antar aktor yakni antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dan Kelurahan yakni terkait tetap adanya peran penasehat kelurahan dalam pengembangan pokdarwis ditengah status kepemilikan lahan yang bukan milik pemerintah kota, namun kelurahan menganggapi hal tersebut dengan cenderung mengabaikan hal tersebut dan tidak menunjukkan keterlibatan aktif dalam proses pengembangan pariwisata Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan di lapangan masih terdapat kendala dalam penelitian ini, berikut merupakan beberapa saran yang bisa diberikan oleh peneliti:

Audiensi dengan Pemilik Lahan

1. Untuk mengatasi permasalahan mendasar terkait status legalitas lahan yang menghambat pengembangan atraksi buatan, aktivitas, aksesibilitas, dan amenitas yang permanen, serta mempengaruhi sikap optimisme Pokdarwis dan dukungan Kelurahan, Perlu dilakukan audiensi terlebih dahulu dengan pihak pemilik lahan (PT Karya Usaha Baru) untuk memahami kesediaan mereka dalam pengembangan objek wisata. Hal ini penting untuk mengetahui apakah pihak pemilik bersedia:

- a) memberikan izin pemanfaatan lahan sebatas fungsi, tanpa melepaskan kepemilikan; atau

- b) melepaskan sebagian hak kepemilikannya untuk kemudian dilakukan pemisahan bidang tanah, yang pada akhirnya dapat dialihkan menjadi hak pakai Pemerintah Daerah.

2. Peningkatan Inisiatif Kerja Sama oleh Pokdarwis

Inisiatif Pokdarwis dalam menjalin kerja sama masih tergolong rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya proaktif untuk membangun kemitraan lintas sektor dengan instansi pemerintah terkait maupun pihak eksternal, seperti akademisi, komunitas, dan pelaku usaha, guna memperkuat kapasitas kelembagaan dan pengembangan wisata.

3. Perluasan Sosialisasi Saluran Komunikasi Resmi

Terdapat masalah terkait distribusi informasi serta ketidakjelasan informasi dalam komunikasi, Pokdarwis perlu melakukan sosialisasi terkait saluran komunikasi resmi, seperti media sosial, surat pemberitahuan, maupun kanal komunikasi komunitas. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian informasi di kalangan pemangku kepentingan maupun masyarakat.

4. Penyerapan Aspirasi Pengunjung.

Pokdarwis disarankan untuk lebih aktif menjangkau aspirasi dan preferensi pengunjung, terutama dari kalangan mahasiswa sebagai pengunjung dominan. Diskusi dan survei kecil dapat digunakan untuk mengetahui minat dan harapan mereka terhadap pengembangan Bukit Senja.

5. Pemberitahuan Kelembagaan ke Kelurahan Tembalang

Untuk mengatasi permasalahan minimnya kepercayaan dan kurangnya keterlibatan aktif Kelurahan dalam pengembangan pariwisata Bukit Senja, yang dipicu oleh ketidakjelasan status dan wewenang terkait kepemilikan lahan Pokdarwis perlu mengirimkan surat resmi pemberitahuan mengenai keberadaan dan eksistensi kelembagaan kepada Kelurahan Tembalang, yang dilengkapi dengan SK Kepengurusan yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

6. Pengajuan Proposal Kegiatan untuk Musrenbang

Pokdarwis diharapkan menyusun dan mengajukan proposal kegiatan kepada Kelurahan Tembalang agar dapat diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Usulan ini dapat difasilitasi oleh RW/RT agar masuk dalam daftar aspirasi warga yang berpotensi memperoleh dukungan anggaran pembangunan serta Menjembatani kesenjangan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk dukungan anggaran, dan memfasilitasi kebutuhan spesifik atraksi/aktivitas/aksesibilitas/amenitas.